

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata "*power*" (kekuasaan atau keberdayaan)". Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka mempunyai kekuasaan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Dalam bahasa arab, pemberdayaan disebut *al-Quwwah* dan dalam bahasa Inggris disebut *empower*.¹³

¹³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kjian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2017), hal. 57.

Menurut Prijono dkk

Pemberdayaan merupakan proses penguatan individu-individu atau masyarakat supaya mereka berdaya. Mendorong atau memotivasi mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya.¹⁴

Menurut Mc. Ardle

Pemberdayaan adalah sebagai proses pengambilan keputusan orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan sebuah keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber daya lainnya.¹⁵

Menurut Payne

Pemberdayaan ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan tindakan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial.¹⁶

Menurut Parsons

Pemberdayaan yaitu sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan-keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan orang lain yang menjadi perhatiannya.¹⁷

¹⁴Saifudin Yunus, dkk, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*,....., hal. 3.

¹⁵Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), hal. 3.

¹⁶Mustangin dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Progam Desa Wisata di Desa Bumiaji*,....., hal 83.

¹⁷Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hal. 58.

Dari pengertian dari beberapa ahli di atas dapat di simpulkan pemberdayaan merupakan sebuah kegiatan perubahan yang menjadika mansia lebih kuat dan mandiri dalam mengambi keputusan dalam kehidupannya dan menumbuhkan pengetahuan serta keterampilan dalam kehiduan mereka yang mana mampu mengubah hidup mereka ke arah yang lebih maju dan sejahtera.

Pemberdayaan sangatlah penting dilakukan terutama kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam membantu menjalankan usaha mereka supaya berjangka panjang dan mampu bersaing dalam perekonomian. Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan jiwa wirausahawan dalam masyarakat sehingga mereka akan mampu dengan mandiri menciptakan kesejahteraan mereka melalui peningkatan perekonomian.

Program pemberdayaan masyarakat dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *bottom up*, dimana pada pelaksanaan dilapangan, dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program pembangunan ini, berhasil atau

tidaknya pelaksanaan program ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.¹⁸

Jadi, dalam peran masyarakat dalam keterlibatannya dengan pelaksanaan pemberdayaan ini sangat penting karena keberhasilan program tersebut sangatlah bergantung terhadap partisipasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat diberikan kebebasan mengajukan aspirasi mereka guna membantu keberhasilan pemberdayaan tersebut, karena pada dasarnya pemberdayaan adalah program untuk memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menyangkut lapisan-lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang kurang mampu yang dinilai tertindas oleh system dan dalam struktur sosial. Upaya pemberdayaan masyarakat ini terdiri dari beberapa segi yaitu :

- 1) Penyadaran tentang peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan atau permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat.
- 2) Penyadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri.
- 3) Meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah dimiliki.

¹⁸Suhartini A. Halim, dkk. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 8.

Prosedur yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang didasarkan pada teori *empowering* adalah: *pertama*, membangkitkan (*enabling*). Pada umumnya, ketidakberdayaan terjadi karena tidak dikenalnya potensi yang dimilikinya. Pada dasarnya proses *enabling* dilakukan untuk membangkitkan kemauan rakyat yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan atas diri dan lingkungannya. *Kedua*, memampukan (*empowering*), pada tahap ini bertujuan agar rakyat menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan dibekali pengetahuan dan bantuan materiil. *Ketiga*, perlindungan (*protektion*), yaitu proses penguatan atau perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jalan keluar untuk beberapa kesulitan yang dihadapi.¹⁹

Dengan demikian, pemaknaan pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat hendaknya bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program-program pemberian, akan tetapi setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri, dan hasil akhirnya memandirikan masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena masyarakat itu sendiri yang mengetahui tentang kebutuhannya dan bagaimana memenuhinya.

b. Pandangan Islam tentang Pemberdayaan Masyarakat

¹⁹Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 188.

1) Landasan Normatif

Semua yang ada di bumi ini mengalami perubahan. Islam memandang perubahan merupakan suatu keharusan dan keniscayaan. Tetapi suatu perubahan harus berubah kearah yang lebih baik. Bahwasannya perubahan itu akan terjadi apabila suatu masyarakat itu berkeinginan untuk berubah sendiri. Masyarakat mempunyai usaha untuk merubah nasibnya agar menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Allah berfirman dalam surat al-Isra' ayat 84 :

سَبِيلٌ أَهْدَىٰ ۗ هُوَ بِمَنْ أَعْلَمَ قَرْبُكُمْ شَاكِلِيهِ عَلَىٰ يَعْْمَلُ كُلُّ قَلْبٌ

Artinya: *“Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”*.

Sementara itu kebutuhan spiritual menghendaki pembangunan moral, pemuasan kebutuhan materi, menghendaki pembangunan umat manusia dan sumber-sumber daya materi dalam suatu pola yang merata, sehingga semua kebutuhan umat manusia dapat dipenuhi secara utuh dan terwujud suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, oleh karena itu, Islam menganggap mengemis sebagai profesi yang tidak selaras dengan martabat manusia sebagai khalifatullah. Oleh sebab itu setiap manusia sehat yang secara fisik dan mental, diharuskan untuk menopang dirinya dan keluarganya. Hal ini tidak mungkin

terwujudkan kecuali apabila tersedia fasilitas untuk melatih mereka menjadi produktif melalui pengembangan kemampuannya dan juga diberikan kesempatan untuk berwirausaha dan bekerja untuk mendapatkan gaji. Pada akhirnya pemerataan pendapatan dan kekayaan tidak hanya dikuasai oleh golongan tertentu (orang kaya).²⁰

Dalam Islam, kita diwajibkan untuk selalu berusaha dalam segala sesuatunya dan tidak boleh bergantung kepada orang lain. Pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat akan membantu mereka mengatasi masalah-masalah perekonomian yang mereka hadapi dengan berbagai jalan yang akan mereka tempuh. Pemberdayaan ini merupakan salah satu cara dalam menuju perubahan terutama pada perubahan perekonomian ke arah yang lebih baik dan dalam jalan yang baik seperti yang dianjurkan oleh Allah SWT.

2) Misi Pemberdayaan menurut Islam

Pemberdayaan dalam Islam mengandung tiga misi diantaranya:

- a) Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis.
- b) Pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan umat islam.

²⁰M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hal. 9.

- c) Membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.²¹

Pemberdayaan yang dilakukan dipandang dari segi Islam memiliki misi yang cukup jelas diantaranya harus sesuai dengan pedoman ekonomi dan bisnis, sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip syariah, serta membangun kekuatan perekonomian Islam dengan harapan dapat menguatkan pelaksanaan dakwah Islam di kemudian hari sebagai sumber dana pendukung.

3) Konsep pemberdayaan dalam Islam

Konsep pemberdayaan dalam Islam berkaitan dengan beberapa hal, yaitu :

- a) Kesadaran tentang ketergantungan diri yang lemah dan yang tertindas kepada yang kuat dan yang menindas dalam masyarakat.
- b) Kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar menawar masyarakat terhadap negara dan dunia bisnis.
- c) Paham tentang strategi untuk “lebih baik memberikan kail daripada memberikan ikan” dalam membantu yang lemah, dengan kata lain mementingkan pembinaan keswadayaan dan kemandirian.

Semua itu dilakukan dengan upaya-upaya pengembangan dan pembangunan kepada peningkatan mutu sumberdaya

²¹M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial, Ekonomi*, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Yogyakarta, 1999, hal. 354.

manusia.²² Jadi, dalam konsepnya, Islam mengaitkan dengan beberapa hal dalam pemberdayaan yaitu kesadaran akan ketergantungan diri kita yang lemah terhadap kaum yang lebih kuat, tawar menawar yang lemah, dan harus mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan/keuntungan pribadi. Kita haruslah saling tolong menolong agar kesejahteraan dapat tercapai secara menyeluruh di lapisan masyarakat.

Pemberdayaan di lembaga Bumdesma ini pada umumnya adalah berprinsip tolong-menolong untuk mencapai kesejahteraan yang merata dengan tata cara yang tidak memberatkan agi masyarakat pada umumnya. Semua resiko akan ditanggung bersama oleh anggota progam tersebut. Hal ini sejalan dengan anjuran Islam untuk tetap mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu.

4) Tujuan Pemberdayaan

Salah satu perwujudan nyata dari konsep pemberdayaan yang tercantum diatas, dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sejalan dengan ajaran Islam. Bahkan pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai sebagai agama

²²M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial, Ekonomi*,....., hal. 356.

gerakan atau perubahan. Seperti firman Allah dalam Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
 ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَ
 لَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan ssesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia.”*²³

Sesuai dengan firman Allah SWT pada ayat tersebut, kita sebagai manusia harus terus bekerja keras untuk menuju perubahan di kehidupan kita yang lebih baik. Begitu pula pemberdayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga merupakan salah satu langkah menuju perubahan khususnya pada perekonomian. Jika kita hanya menggantungkan diri kita maka Allah tidak akan merubah nasib kita menjadi lebih baik, maka dari itu pemberdayaan perlu dilakukan untuk menjadikan manusia

²³Al-Qur'an Surat Al-Ra'd ayat 11, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik RI, (Jakarta : Fokus Media, 2010), hal. 250.

bisa mandiri dan menjadi kreatif dan inovatif yang akan memicu adanya peningkatan pada taraf hidup mereka.

Konsep pemberdayaan masyarakat pun merupakan paradigma baru dalam pembangunan, dimana konsep tersebut memiliki tujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat. Bentuk partisipasi yang diharapkan adalah masyarakat mampu mendefinisikan dan mencoba memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Menurut Kesi Widjajanti yang ditulis dalam jurnalnya tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki.²⁴

Oleh sebab itu pemberdayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Hal

²⁴Kesi Widjajanti, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12, no.1, tahun 2011, hal. 16.

tersebut diharapkan nantinya masyarakat mampu memiliki kemampuan untuk merubah keadaannya menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan mampu meningkatkan perekonomian di desa tersebut.

c. Pengertian Strategi

Secara bahasa strategi berasal dari kata *strategic* yang berarti menurut siasat atau rencana dan *strategy* yang berarti ilmu siasat. Menurut istilah strategi adalah rencana yang cermat mengenal kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.²⁵ Strategi adalah bakal tindakan yang menuntun keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang banyak merealisasikannya. Di samping itu, strategi juga mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka panjang, paling tidak selama lima tahun. Oleh karena itu, sifat strategi adalah berorientasi ke masa depan. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional dan dalam perumusannya perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dihadapi perusahaan.²⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah cara yang tertata dan terarah atau siasat yang disusun untuk melakukan sesuatu yang akan mempengaruhi kehidupan individu atau kelompok dalam jangka panjang. Dalam kegiatan pemberdayaannya, Bumdesma juga mempunyai beberapa

²⁵Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 cet. 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 423.

²⁶Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal. 14.

strategi yang digunakan untuk menunjang keberhasilan program tersebut. Baik strategi dalam bentuk unit usahanya dan tata cara pemberdayaannya melalui suatu unit usaha yang mana disesuaikan dengan usaha yang ada di masyarakat.

d. Strategi Pemberdayaan dalam Islam

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan fiskal menurut Islam bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

1) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menurut Islam pengadaan pendidikan pada zaman sekarang harus dilakukan untuk setiap penduduk, maka dari itu anggaran pemerintah perlu diarahkan kepada pendidikan dasar dan menengah.

2) Memenuhi kebutuhan dasar manusia

Pengadaan *market good* dan *private good* sudah seharusnya dilakukan oleh negara dan lembaga-lembaga swasta. Misalnya mengenai penyediaan air bersih atau air minum di daerah-daerah yang langka air. Negara mempunyai kewajiban untuk pengadaannya. Disini masyarakat lokal bisa mengambil prakarsa untuk pengadaan air secara swadaya, tentu saja dengan bantuan masyarakat setempat.

3) Menggratiskan fasilitas kesehatan

Kesehatan memang merupakan *private good* masyarakat. Tetapi meskipun begitu pengadaannya tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, pemerintah bisa membantu dengan menyediakan *primary health care*, atau kesehatan umum (*public health*) yang tergolong kedalam *public good*. Dengan kata lain kesehatan dasar adalah suatu *collective good* yang diputuskan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah.

- 4) Memberantas kemiskinan dan kepincangan pendapatan masyarakat, disini pemerintah bisa membentuk dan menciptakan proyek-proyek padat karya bagi masyarakat, pembentukan unit-unit usaha yang bersifat kekeluargaan dan kerjasama.²⁷

Jadi strategi peberdayaan dalam Islam dapat melalui kebijakan fiskal diantaranya dengan cara mengembangkan pengetahuan dan teknologi, memenuhi kebutuhan pokok manusia, menggratiskan fasilitas kesehatan, dan memberantas kemiskinan akibat dari ketidakmerataan pendapatan.

Peranan negara dipandang penting sebagai perwujudan pelaksanaan amanah untuk mengembangkan dan memelihara kelestarian sumber daya alam melalui perundang-undangan dengan berdasarkan syari'ah. Namun pelaksanaan amanah itu perlu diimbangi dengan partisipasi masyarakat yang berdasarkan swadaya. Kebijakan fiskal disamping melaksanakan fungsi stabilisator dan

²⁷M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial, Ekonomi*, Lembaga Studi Agama dan Filsafat,.....,hal. 70-72.

fungsi distribusi untuk menciptakan keadilan sosial, juga berfungsi mengarahkan alokasi sumberdaya, melalui berbagai fasilitas insentif, sehingga bisa mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan swadaya dalam memecahkan masalah-masalah mereka sendiri secara lebih mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah.

Seperti halnya pemberdayaan di Bumdesma yangmana dilakukan dengan mengelola potensi-potensi lokal di suatu daerah tersebut dan memfasilitasinya dengan harapan dapat meningkatkan swadaya masyarakat di daerah tersebut secara mandiri.

e. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah

- 1) Pada saat sosialisasi, masyarakat diharapkan ikut hadir, mendengarkan, menyimak, memahami, dan jika mampu menyampaikan ide atau gagasan yang dimiliki.
- 2) Pada tahap perencanaan, masyarakat diharapkan ikut dalam memutuskan suatu usulan/gagasan program akan dilakukan.

- 3) Pada tahap pelaksanaan, masyarakat diharapkan mau ikut melaksanakan kegiatan yang telah di putuskan bersama dengan suka rela dan gotong royong.
- 4) Pada tahap pengendalian, masyarakat diharapkan ikut aktif mengawasi untuk mengantisipasi adanya penyimpangan atau meluruskan arah yang kurang tepat agar sesuai dengan tujuan kesepakatan semula.
- 5) Pada tahap pelestarian, masyarakat diharapkan ikut bertanggung jawab untuk merawat, memelihara, memperbaiki jika terjadi kerusakan dan lainnya.
- 6) Pada tahap pengembangan kegiatan, secara suka rela masyarakat diharapkan untuk tetap ikut serta menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan agar nilai manfaatnya tetap terjaga dan semakin luas.
- 7) Pada tahap pasca kegiatan, masyarakat di harapkan merasakan hasilnya dan tetap menjaga nilai manfaat tersebut agar tetap bias dinikmati generasi berikutnya.²⁸

Jadi, pelaksanaan pemberdayaan mulai dari tahap sosialisai, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, pengembangan kegiatan, dan pasca kegiatan semuanya dilakukan bersama-sama dengan masyarakat agar pemberdayaan berjalan dengan baik dan berhasil.

²⁸Azis Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hal. 33-34.

d. Tipe-Tipe Pemberdayaan

Bowen dan Lawler mendefinisikan tiga tipe pemberdayaan diantaranya:

1) *Suggestion Involvement*

Para karyawan didorong untuk menyumbangkan ide-ide melalui program-program saran formal atau lingkungan-lingkungan kualitas, tetapi kegiatan-kegiatan kerja sehari-hari mereka tidak benar-benar berubah. Mereka hanya diperdayakan untuk merekomendasikan, biasanya manajemen mempertahankan kekuasaan untuk memutuskan apakah hendak mengimplementasikan ide-ide yang mereka berikan atau tidak.

2) *Job Involvement*

Disini pekerjaan didesain ulang sedemikian rupa, sehingga para karyawan menggunakan aneka keterampilan. Karyawan percaya tugas-tugas mereka penting, mereka mempunyai kebebasan lumayan besar dalam memutuskan bagaimana mengerjakan pekerjaannya.

3) *High Involvement*

Organisasi-organisasi *high involvement* memberi para karyawan tingkat terendah mereka perasaan di libatkan tidak hanya dalam bagaimana mereka mengerjakan pekerjaan mereka,

atau seberapa efektif kinerja kelompok mereka, tetapi juga dalam kinerja total organisasi.²⁹

Dari ketiga tipe pemberdayaan yang dituturkan oleh Bowen dan Lawler, di Bumdesma menggunakan tipe *suggestion invoment* dan *job involment* dimana pihak-pihak yang terlibat diberikan kebebasan untuk berpendapat tetapi juga pihak manajemen akan mempertimbangkan kembali pendapat mereka. Para karyawan dan anggota juga diperbolehkan menggunakan keterampilan mereka dalam menuntaskan tugas mereka dengan tetap pada acuan peraturan di lembaga tersebut.

e. Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat

Michael Osbaldeston, *chief executive* Ashridge Management College menegaskan bahwa mengapa pemberdayaan telah begitu penting akhir-akhir ini, di antaranya adalah :

- 1) Kecepatan perubahan yang semakin tinggi, turbulensi lingkungan, cepatnya respon persaingan, dan akselerasi permintaan-permintaan pelanggan menuntut kecepatan dan fleksibilitas tanggapan sudah tidak cocok dengan cara kerja organisasi dengan model kontrol dan komando gaya lama itu.
- 2) Organisasi-organisasi sendiri tengah berubah. Akibat dari perampangan, pemangkasan hierarki struktural, dan

²⁹David Clutterbuck dan Susan Kornaghan, *The Power of Empowerment (Release the Hidden Talents of your Employees)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2010), hal. 8.

desentralisasi berarti bahwa metode-metode kuno pencapaian koordinasi dan kontrol tidak lagi sesuai. Upaya mencapai kinerja dalam situasi dan kondisi baru ini menuntut agar staf mengemban tanggung jawab yang jauh lebih besar.

- 3) Organisasi-organisasi menuntut kinerja yang lebih lintas fungsi, kerja sama lebih padu diantara bidang-bidang, integrasi lebih baik dalam proses jika organisasi-organisasi ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Kerja sama itu bisa di capai lewat pemberdayaan.
- 4) Pemberdayaan bisa mengungkapkan sumber-sumber bakat manajerial, yang dulunya tidak dikenali, dengan menciptakan situasi dan kondisi di mana bakat bisa tumbuh subur.³⁰

Dari poin-poin di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan itu sangat penting dilakukan mengingat persaingan di dunia bisnis saat ini semakin ketat, terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat, tidak cocoknya aturan lama digunakan dalam organisasi pada saat ini dan masih banyak lagi. Untuk itu pemberdayaan dilakukan supaya masyarakat mampu menghadapi perubahan-perubahan yang sedang terjadi untuk keberlangsungan hidup mereka.

2. Perkembangan Usaha

a. Pengertian Perkembangan Usaha

³⁰*Ibid.*, hal. 15.

Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Salah satu ciri suatu usaha atau bisnis berkembang adalah selalu saja kekurangan modal. Artinya bila bisnisnya bertambah maju dan omset naik, maka dituntut pula menyediakan modal tambahan. Dengan adanya sikap dan semangat berwirausaha disertai dengan pemberian bantuan modal, diharapkan usaha para pengusaha kecil dapat berkembang, sehingga pendapatan yang diperoleh meningkat.³¹

Seperti halnya pada masyarakat yang memiliki usaha perikanan, pada mulanya mereka masih memiliki beberapa ratus atau tibu benih atau ikan yang kemudian apabila usaha mereka semakin maju tentunya akan membutuhkan lahan dan ikan yang lebih. Untuk memenuhinya, mereka akan membutuhkan modal tambahan yang mana tambahan modal tersebut dapat mereka peroleh dari pinjaman bank, saudara, atau lembaga keuangan lainnya seperti Bumdesma. Dengan demikian, usaha mereka bisa dikatakan berkembang seiring meningkatnya pendapatan mereka dari usaha tersebut.

Dinamika perkembangan usaha merujuk pada proses (tahapan) perkembangan suatu unit usaha atau kelompok usaha kecil dari proses perintisan (pendirian) sampai menjadi kondisi seperti yang terakhir diamati. Bisa terjadi suatu unit usaha memasuki tahap

³¹Purdi E. Chandra, *Menjadi Entrepreneur sukses*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 121.

berkembang atau mencapai tahap akumulasi modal. Kategorisasi usaha ke dalam tahapan perkembangan didasarkan pada karakter umum usaha kecil yang ada di Indonesia yang teramati melalui pengalaman penelitian di lapangan.

Menurut Dedi Haryadi, dkk, tahap perkembangan usaha kecil dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yakni usaha tahap rintisan, tahap berkembang, dan tahap akumulasi modal. Perbedaan itu didasarkan pada jumlah tenaga kerja dan jenis pekerja (pekerja keluarga atau buruh upahan) yang digunakan, orientasi pasar, kemampuan menembus pasar, tingkat keterampilan, strategi pengamanan bahan baku, respons dan adopsi terhadap teknologi, volume produksi, kualitas produksi, pola/proses produksi dan organisasi. Pencirian masing-masing tahap tersebut masih bersifat kualitatif.³²

Menurut Soeharto Prawirokusumo, tahap perkembangan usaha dapat dibedakan menjadi 5 tahapan, yaitu (1) tahap *conceptual*, (2) tahap *start up*, (3) tahap stabilisasi, (4) tahap pertumbuhan (*grow stage*) dan (5) tahap kedewasaan.³³

Segala jenis usaha seperti usaha perikanan tenunya akan mengalami beberapa tahap di atas dalam proses perkembangan usahanya. Suatu usaha pasti diawali dengan perintisan yang

³²Dedi Haryadi, dkk, *Tahap Perkembangan Usaha Kecil: Dinamika dan Peta Potensi Pertumbuhan*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 1998), hlm. 21.

³³Soeharto Prawirokusumo, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta: BPF, 2010), hlm 185-188.

kemudian bagaimana mereka mengelola usaha tersebut supaya usahanya dapat berkembang dan terhindar dari kebangkrutan.

b. Indikator Perkembangan Usaha

Indikator perkembangan usaha ditunjukkan dengan omset yang diperoleh pengusaha dalam waktu per bulan. Hasil studi empiris dari Liedholm dan Parker dalam Tulus Tambunan disebutkan bahwa jumlah pekerja dan unit usaha meningkat mengikuti pendapatan riil per kapita. Indikator perkembangan industri skala kecil (SK) yang umum digunakan dalam literatur adalah pertumbuhan nilai atau volume output (produktivitas), peningkatan kontribusi output terhadap PDB dan pertumbuhan kerja. Perkembangan usaha yang akan ditinjau dari pendapatan rata-rata yang diterima pengusaha.³⁴

Jadi indikator perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatannya, yaitu ditandai dengan meningkatnya omset penjualan. Meningkatnya penjualan dapat berasal dari bertambahnya barang dagangan, bertambahnya jumlah pembeli. Dengan meningkatnya barang dagangan perlu modal yang tidak sedikit. Apabila tidak memiliki modal maka memerlukan bantuan modal. Dengan demikian dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Dalam usaha perikanan, indikator perkembangannya dapat dilihat dari bertambahnya lahan dan volume ikan yang

³⁴Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 104.

dibudidayakan akibat dari pertambahan penjualan mereka. Untuk usaha perikanan yang sudah besar tentunya akan membutuhkan karyawan dan kalau terus meningkat tidak menutup kemungkinan untuk menambah jumlah karyawan mereka.

c. Faktor Penghambat Perkembangan Usaha

Faktor penghambat perkembangan usaha dapat dilihat melalui beberapa bidang, antara lain:

- 1) Bidang keuangan, masalah yang paling menonjol adalah kurangnya modal kerja untuk mengembangkan usaha dan terbatasnya akses ke Bank;
- 2) Bidang Pemasaran, masalah yang paling dominan adalah usaha kecil seringkali kesulitan memasarkan produknya sehingga usahanya sulit untuk dapat berkembang.
- 3) Bidang bahan baku, masalah yang dominan adalah pembayaran bahan baku atau barang dagangan seringkali harus tunai, sedangkan tidak semua usaha kecil mempunyai kemampuan untuk itu;
- 4) Bidang Tenaga kerja, masalah yang dominan adalah sering ganti karyawan dan kesulitan membayar karyawan sesuai dengan UMK;
- 5) Bidang manajemen masalah yang paling menonjol adalah kemampuan kewirausahaan yang masih terbatas dan kurang

mampu dalam mengantisipasi peluang pasar.³⁵

Dalam mencapai kesuksesan dalam berwirausaha tentunya para pelaku usaha akan mengalami beberapa hambatan diantaranya dari bidang keuangan, pemasaran, bahan baku, tenaga kerja, dan sikap kewirausahaan yang masih terbatas. Dalam dunia usaha perikanan hambatan semacam itu akan dijumpai mengingat harga pakan yang bila diakumulasikan akan lebih mahal daripada harga ikan sendiri. Selain itu karena banyaknya pesaing di bidang yang sama juga akan memberikan hambatan penjualan mereka apabila mereka salah meniali peluang pasar dan pemasaran yang kurang bagus. Selain itu sikap wirausahawan dan wawasan yang kurang akan memperlambat usaha mereka mengalami kemajuan.

3. Usaha Ekonomi Produktif

a. Pengertian Usaha Eonomi Produktif

Usaha ekonomi produktif (UEP) merupakan kegiatan yang berkaitan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga atau kelompok usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta ketahanan pangan bagi masyarakat lokal. “Usaha ekonomi produktif sesuai pengertian dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 :Tahun 2009 tentang Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif adalah segala usaha yang dilakukan kelompok dalam rangka

³⁵Indrawati, *Perkembangan Usaha Mikro Kecil* dalam <http://blog.stie-mce.ac.id/indrawati>, diakses pada 23 Oktober 2019

meningkatkan pendapatan masyarakat.” Maksud dari usaha ekonomi produktif ini adalah mendorong terjadinya peningkatan aktifitas dan kreatifitas di daerah miskin. Pemberian modal untuk usaha yang satu ini dapat berkisar antara Rp2.500.000-Rp7.500.000 melalui lembaga keuangan yang bersifat meminjamkan dan berbunga rendah. Usaha ini biasanya disesuaikan dengan potensi lingkungan serta keterampilan yang dimiliki pengurus atau anggotanya. Jenis usaha ekonomi produktif yang dapat dijalankan diantaranya yaitu, usaha kerajinan rotan, perbengkelan, produk olahan hasil bumi, peternakan, pembibitan, dan sebagainya.³⁶

Dengan demikian, usaha ekonomi produktif ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan terutama bagi masyarakat di wilayah-wilayah kecil seperti pedesaan dengan memanfaatkan potensi-potensi alam yang ada di wilayah tersebut. Masyarakat yang tengah atau mau menjalani usaha akan diberikan bantuan modal yang sesuai agar usaha mereka dapat berjalan. Usaha ekonomi prduktif ini juga terdapat di Bumdesma yang merupakan salah satu lembaga penggerak perekonomian yang berada di wilayah kecamatan.

Dengan berbagai macam usaha tentunya akan membutuhkan bahan baku yang beragam pula. Seseorang yang ikut bergabung di dalam kegiatan usaha ekonomi produktif ini harus bisa

³⁶Dedi Supriyadi, *Upaya Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif oleh Perguruan Tinggi*, Jurnal Copetition, Vol. VIII, No. 1, Tahun 2017, hal. 18.

memperhitungkan nilai ekonomis dan mampu bersaing di pasaran. Manajemen produksi dan pengelolaan yang baik dan bergaya hidup yang sederhana akan membuat usaha ekonomi produktif ini akan berjalan dengan baik serta perencanaan usaha yang mantap akan menghasilkan profit yang banyak.

Contohnya pada para pelaku usaha perikanan, ketika mereka telah memilih perikanan sebagai usaha mereka, mereka harus memperhitungkan nilai ekonomis dan harus mampu membaca peluang pasar sehingga mereka akan bisa bersaing dengan pengusaha lain yang sebidang. Selain itu pengelolaan yang baik terhadap usahanya baik manajemen dan perawatan ikannya juga akan mempengaruhi keberlangsungan usaha tersebut.

Pedoman Kelompok Usaha Bersama Tahun 2011, tentang usaha ekonomi produktif (UEP) disebutkan bahwa usaha ekonomi produktif merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan, tabungan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.³⁷

Bantuan usaha ekonomi produktif merupakan program pemerintah melalui instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2008. Dengan instruksi tersebut Menteri Koordinator Bidang

³⁷Kementerian Sosial RI, *Modul Pendampingan Pelayanan Sosial Lanjut Usia*, (Jakarta: Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, 2014), hal. 167.

Perekonomian, Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pusat Statistik segera mengkoordinasikan pelaksanaan program dengan melibatkan menteri-menteri terkait. Selanjutnya gubernur dan bupati/wali kota beserta jajarannya setingkat kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program bantuan rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah masing-masing.

Kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif umumnya didanai dari berbagai sumber pendanaan. Sumber atau pola pendanaan yang umum dilakukan antara lain bantuan pemerintah yang berada di bawah naungan dinas sosial, dimana bantuan tersebut bersifat sementara dan ditujukan untuk masyarakat miskin yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan kemandirian masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan pendampingan oleh dinas sosial dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan perkembangan usaha ekonomi tersebut.³⁸

Sama persis dalam bantuan modal melalui usaha ekonomi produktif di Bumdesma yang mana modal tersebut bersifat sementara dalam arti masyarakat harus bersedia mengembalikan modal tersebut sesuai dengan jatu tempo dan tata cara yang telah disepakati. Modal tersebut haruslah benar-benar digunakan untuk mengembangkan

³⁸*Ibid.*, hal. 186.

usaha yang mereka jalankan, bukan untuk kegiatan lainnya seperti kegiatan yang bersifat konsumtif.

b. Tujuan Usaha Ekonomi Produktif

Usaha ekonomi produktif dilaksanakan pemerintah dengan berbagai tujuan, yang mana tujuan tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun tujuan dari kegiatan usaha ekonomi produktif antara lain:

1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Dalam mewujudkan perekonomian yang maju pemberdayaan untuk memandirikan masyarakat sangat penting. Dengan meningkatnya pemberdayaan masyarakat maka perekonomian di suatu wilayah dapat terus tumbuh dan bebas dari ketimpangan sosial. Untuk itulah program usaha ekonomi produktif ini salah satunya bertujuan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal terutama di daerah pedesaan.

2) Menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan

Dengan bertambah dan berkembangnya usaha akan menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitar sehingga dapat menekan angka pengangguran. Selain itu usaha ekonomi produktif juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha kepara

masyarakat supaya dapat dengan mandiri meningkatkan perekonomian mereka

- 3) Mengembangkan kegiatan dan kesempatan berusaha berbasis potensi lokal

Usaha ekonomi produktif merupakan usaha di sektor riil dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada sehingga sumberdaya yang ada di suatu wilayah tersebut dapat dikelola dengan baik dan menjadikan suatu wilayah menjadi lebih maju dan sejahtera.

- 4) Meningkatkan pendapatan

Dengan banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan serta terbukanya lapangan pekerjaan akan meningkatkan pendapatan para penduduk di suatu wilayah tersebut.

- 5) Meningkatkan ketahanan pangan dan mengembangkan stok pangan lokal (cadangan pangan)³⁹

Dapat disimpulkan usaha ekonomi produktif ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan potensi-potensi lokal, dan meningkatkan ketahanan pangan lokal. Pengelolaan bantuan usaha ekonomi produktif diarahkan untuk pengembangan dan penggerak sektor ekonomi yang merupakan salah satu kekuatan sendi dalam upaya pengentasan kemiskinan. usaha ekonomi

³⁹Kemenkeu, *Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per 19/PB/2005, tentang Tujuan Usaha Ekonomi Produktif*, hal. 33.

produktif merupakan kegiatan masyarakat desa di sektor riil, bisa berupa produksi suatu bahan, barang, bidang penjualan, atau pemasaran maupun bentuk jasa.

c. Sasaran Usaha Ekonomi Produktif

Sasaran penerima manfaat kegiatan usaha ekonomi produktif diprioritaskan kepada rumah tangga rawan pangan/miskin yang tergabung dalam kelembagaan masyarakat seperti Kelompok Afinitas/ Kelompok Usaha Ekonomi/ Kelompok Tani/ Gapoktan/ Koperasi/ Koperasi Tani/ Koperasi Unit Desa (KUD). Sasaran wilayahnya adalah desa/kelurahan rawan pangan/miskin, desa/kelurahan rawan pangan/miskin yang masyarakatnya sudah dibina melalui Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3RIP).⁴⁰

Di Bumdesma sendiri, usaha ekonomi produktif juga diperuntukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang tergabung dalam lembaga tersebut. Hal ini supaya pemerataan pendapatan dapat terjadi dan mengurangi adanya kesenjangan sosial. Mengingat sebagian besar masyarakat di wilayah pedesaan masih banyak yang kesulitan dalam hal perekonomian, maka dari itu usaha ekonomi produktif ini akan sangat membantu mereka untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal.

⁴⁰Dinas Ketahanan Pangan. *Usaha Ekonomi Produktif* dalam <http://dkpp.jabarprov.go.id>usaha-ekonomi-produktif-uep/>, diakses pada 20-03-2019.

d. Indikator Keberhasilan

Dalam kegiatannya usaha ekonomi produktif mempunyai target yang harus dicapai dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Kegiatan usaha ekonomi produktif dapat dikatakan berhasil apabila sudah memenuhi beberapa indikator keberhasilan usaha ekonomi produktif. Indikator keberhasilan kegiatan usaha ekonomi produktif tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terbangunnya kegiatan usaha ekonomi,
- 2) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan anggota melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah anggota pada kegiatan usaha ekonomi produktif,
- 3) Menciptakan lapangan kerja untuk anggota dan masyarakat,
- 4) Berkembangnya kegiatan yang berupa aktivitas dan kreativitas usaha, pemasaran dan jasa,
- 5) Berkembangnya investasi/modal usaha di dalam usaha ekonomi produktif.⁴¹

Suatu usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh suatu lembaga dikatakan berhasil apabila telah memenuhi beberapa indikator keberhasilan tersebut. Terlihat cukup sederhana namun diperlukan strategi yang baik agar usaha ekonomi produktif dapat terus berjalan

⁴¹Dedi Supriyadi, *Upaya Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif oleh Perguruan Tinggi*, Jurnal Copetition, Vol. VIII, No. 1, Tahun 2017, hal. 19.

dan memberikan dampak yang bagus bagi masyarakat. Bertambahnya lapangan pekerjaan dan menurunnya angka kemiskinan telah mampu menunjukkan bahwa usaha ekonomi produktif tersebut berhasil dilaksanakan.

4. Badan Usaha Milik Desa Bersama

a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengertian Bumdes menurut Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang Bumdes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.⁴² Sedangkan pengertian Badan Usaha Milik Desa menurut Maryunani adalah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁴³

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk mengembangkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kemampuan dan potensi desa. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan perekonomian desa. Badan

⁴²Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hal. 1

⁴³Maryunani, *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hal. 35

Usaha Milik Desa Bersama merupakan badan usaha yang bergerak dalam sektor perekonomian desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat harus terlibat dari awal pendirian lembaga tersebut supaya dapat mengetahui dan memahami kegiatan lembaga tersebut.⁴⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes adalah badan usaha milik desa yang mana pengelolaannya secara penuh dilakukan oleh masyarakat desa dan pemerintah desa yang menggunakan dana desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal di wilayah tersebut.

b. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)

Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) disamping badan usaha yang menaungi Bumdes juga dapat berperan langsung dalam mengelola usaha masyarakat di desa. UU no. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa Bumdesma didirikan atas dasar musyawarah antar desa yang sepakat untuk mendirikan Bumdesma yang terdiri dari beberapa desa dengan tujuan yang sama seperti Bumdes.⁴⁵ Unit usaha yang dijalankan oleh Bumdesma merupakan hasil dari kesepakatan antar desa yang bersangkutan. Melalui Bumdesma,

⁴⁴Amelia Sri Kusuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa", *Journal of Rural and Development*, Vol. 5, No. 1, tahun 2014, hal. 2

⁴⁵BUMDESA, *Badan Usaha Milik Desa Bersama (Pembangunan Kawasan Perdesaan)* dalam <https://www.lihatdesa.com/2018/03/badan-usaha-milik-desa-bersama.html?m=1>, diakses 15 Desember 2019.

pemberdayaan masyarakat diharapkan akan cepat terlaksana dan dapat melahirkan produk unggulan lokal yang mampu menjadi citra positif dalam kompetisi pasar bebas.

Bumdesma merupakan lanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam rangka melaksanakan amanah UU Desa No 6 tahun 2014 untuk melestarikan dan mengembangkan aset agar kemandirian ekonomi di kawasan perdesaan tercapai. UU Desa No. 6 tahun 2014 ini pada dasarnya mengatur mengenai Bumdes yang tumbuh pada skala lokal desa. Selain itu, UU tersebut juga memberikan ruang dan kesempatan kepada dua desa atau lebih menjalin kerjasama, melalui wadah Bumdesma.⁴⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bumdesma merupakan lembaga yang berada di wilayah kecamatan yang tujuannya adalah sama dengan Bumdes yang berada di desa yaitu menguatkan perekonomian wilayah pedesaan yangmana ragam unit usahanya merupakan hasil musyawarah antar desa yang bersedia mendirikan Bumdesma. Berbeda dengan Bumdes yang berdiri murni karena UU pemerintah, Bumdesma ini merupakan bentuk lanjutan dari PNPM Mandiri Pedesaan.

c. Tujuan Badan Usaha Milik Desa Bersama

⁴⁶Modul BUMDESMA Sumbergempol tahun 2018, hal 3.

Tujuan Bumdesma yaitu untuk mengoptimalkan dalam pengelolaan asset asset milik desa yang ada, meningkatkan perekonomian desa, serta membawa masyarakat lebih sejahtera, dan fungsi Bumdesma sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Milik Desa (PADes), dan sebagai sarana untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.⁴⁷ Terdapat 6 sektor jenis usaha Bumdesma, yaitu:

- 1) *Serving*, jenis Bumdesma seperti ini adalah yang menyediakan bisnis sosial yang melakukan pelayanan publik seperti penyediaan air minum, pengelolaan air bersih ataupun penyulingan, usaha listrik desa ataupun lumbung pangan.
- 2) *Banking*, yaitu usaha lembaga keuangan atau koperasi yang mempermudah masyarakat dalam kebutuhan dana.
- 3) *Renting*, adalah jenis usaha persewaan yang melayani kebutuhan masyarakat setempat.
- 4) *Brokering*, adalah usaha yang menyediakan jasa perantara yang menghubungkan barang barang komoditas pertanian dengan pasar. Hal ini ditujukan agar para petani tersebut tidak kesulitan untuk mencapai pasar.
- 5) *Trading*, adalah usaha jual beli barang dagangan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

⁴⁷Amelia Sri Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, *Journal of Rural and Development*, Vol. 5, No. 1, tahun 2014, hal. 2.

6) *Holding*, adalah induk usaha dari usaha lainnya.⁴⁸

Jadi, pada umumnya unit usaha di Bumdesma dapat digolongkan menjadi 6, yaitu *serving*, *banking*, *renting*, *brokering*, *trading*, dan *holding*. Di Bumdesma Sumbergempol sendiri memiliki jenis usaha berupa *serving*, *banking*, dan *trading*. Dalam sektor *serving*, Bumdesma tersebut menyediakan bahan pangan terutama bahan pokok yang diambil langsung dari para petani di wilayah tersebut yang kemudian dijual kepada masyarakat luas. Pada sektor *banking*, Bumdesma menyediakan modal bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal untuk membantu mengembangkan usaha mereka yang mana modal tersebut harus dikembalikan sesuai dengan jatuh tempo beserta biaya jasa yang telah disepakati. Sedangkan untuk sektor *trading*, Bumdesma juga menyediakan kebutuhan masyarakat lainnya berupa keperluan rumah tangga dengan harga yang lebih murah.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber yang ada, peneliti memperoleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Adapun penelitian terdahulu tersebut meliputi:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Gusti Putu Putra dan Made Kembar Sri Budhi⁴⁹ (2015) yang berjudul “Efektivitas dan Dampak

⁴⁸Ahmad Maslahatul Furqon, dkk, *Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jurnal Keuangan Publik Islam, Vol. 1, No. 6, tahun 2018, hal. 7

Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas dan dampak PNPM-MPd terhadap peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja rumah tangga. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah statistik dengan melakukan pengujian terhadap variabel. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif deskriptif, yang menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan metode observasi melalui wawancara. Dari hasil peneitian tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan PNPM-MPd terbukti efektif dalam menanggulangi kemiskinan dan berdampak positif dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan serta kesempatan kerja di Kecamatan Abiansemal. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan progam, proses pelaksanaan progam, proses pengawasan dan pengendalian progam yang dilaksanakan oleh PNPM-MPd di kecamatan Abiansemal. Adapun persamaan dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian dilakukan terhadap Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang merupakan progam sebagai cikal bakal terbentuknya Badan Usaha Milik

⁴⁹I Gusti Putu P. dan Made Kembar S.B, *Efektivitas dan Dampak Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung*, Jurnal Ekonomi dab Bisnis Universitas Udayana Vol. 4, No. 3, Tahun 2015, diakses pada 1 November 2019.

Desa Bersama (BUMDESMA) dan metode yang digunakan adalah metode statistik.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Sururi⁵⁰ (2015) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Progam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak” yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas pemberdayaan yang dilakukan melalui progam pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang mana dikumpulkan dengan wawancara. Melalui metode tersebut diperoleh hasil penelitian yaitu pemberdayaan yang dilakukan melalui progam pembangunan infrastruktur perdesaan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Wanasalam. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan progam tersebut dan cenderung pasif saat menerima keputusan. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah progam yang digunakan dalam memberdayakan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁵⁰Ahmad Sururi, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Progam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 3, No. 2, tahun 2015, diakses pada 1 November 2019.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan Oleh Mustanin⁵¹ (2017) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Progam Desa Wisata di Desa Bumiaji” yang bertujuan memberikan wawasan dalam rangka pengembangan desa wisata sehingga masyarakat dapat memanfaatkan potensi lokal yang ada di desa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara. Dengan metode tersebut diperoleh hasil penelitian yaitu adanya desa wisata di Desa Bumiaji masyarakat bisa berpartisipasi dalam rangka mensukseskan program desa wisata. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka karena adanya perubahan perilaku dari masyarakat Desa Bumiaji. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah terletak pada proses pemberdayaan yang dilakukan yaitu melalui program desa wisata yang diharapkan mampu memberikan perubahan di Desa Bumiaji.
4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syafrida⁵² (2017) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian

⁵¹Mustanin, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Progam Desa Wisata di Desa Bumiaji*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2, No. 1, Tahun 2017, diakses pada 30 Desember 2019.

⁵²Syafrida, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*, (Sumatera Utara, Skripsi tahun 2018).

melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dalu X A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Teknik dalam pengambilan data adalah dengan observasi, partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Dari metode penelitian tersebut diperoleh hasil penelitian yaitu pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan cukup baik, dan cukup mampu mengatasi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dilihat dari terarahnya upaya yang dilakukan oleh BUMDes, pelaksanaan sesuai dengan sasaran, dan respon masyarakat yang positif terhadap keberadaan BUMDes yang semua itu telah terbukti memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang ini yaitu dalam penelitian ini hanya meneliti pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes secara keseluruhan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusmuriyanto, Muhammad Feriady, dan Nurdian Susilowati⁵³ (2019) yang berjudul “Inisiasi Pembentukan BUMDes Bersama untuk Meningkatkan Perekonomian Desa di Kecamatan Jambu di Kabupaten Semarang” yang bertujuan untuk mengetahui perlu atau tidaknya pembentukan BUMDes Bersama

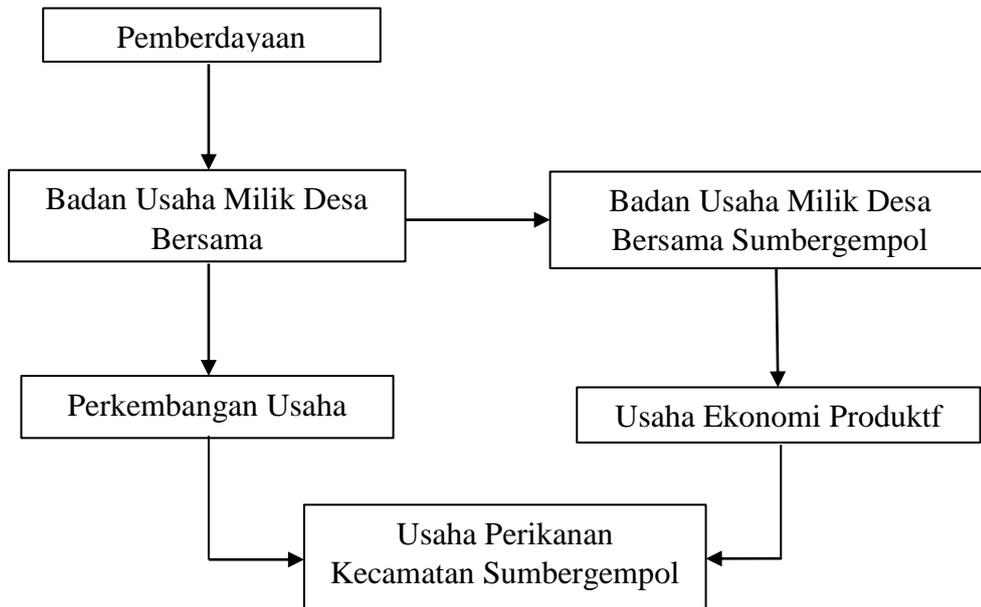
⁵³Kusmuriyanto, dkk, *Pembentukan BUMDes Bersama untuk Meningkatkan Perekonomian Desa di Kecamatan Jambu di Kabupaten Semarang*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 23, No. 2, Tahun 2019, diakses pada 30 Desember 2019.

untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa di Kecamatan Jambu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, pengumpulan datanya dengan wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan dan data yang disajikan berupa data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pembentukan BUMDes Bersama sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Meskipun di tiap desa sudah ada BUMDes namun pengelolaannya belum maksimal sehingga diperlukanlah BUMDes Bersama untuk membantu mengkoordinir BUMDes-BUMDes yang ada di desa tersebut dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi wilayah tersebut. Persamaan dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti mengenai Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) keterkaitannya dengan perekonomian masyarakat. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut lebih memfokuskan mengenai dampak dari pembentukan BUMDESMA disamping BUMDes yang sudah ada.

C. Skema Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir berguna untuk mempermudah di dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian

pada pemecahan masalah.⁵⁴ Kerangka berfikir yang peneliti buat dalam penelitian ini sebagai berikut:



Keterangan :

Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada suatu wilayah. Salah satu strategi pemberdayaan adalah melalui program Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) yang mana dibentuk untuk memandirikan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi mereka dengan cara memanfaatkan potensi lokal yang ada. Seperti yang dilakukan oleh BUMDESMA Sumbergempol untuk membantu mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha perikanan di kecamatan Sumbergempol, melalui salah satu programnya yaitu usaha ekonomi produktif. Dengan adanya pemberdayaan akan merubah perilaku masyarakat untuk dapat ,mengembangkan usaha perikanan yang dilakukan.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.....*, hal. 60